

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA DI KECAMATAN SIMEULUE BARAT)

Eliana

STIES Banda Aceh
eliana@stiesabang.ac.id

Nurhayati

STIES Banda Aceh
nurhayati@stiesabang.ac.id

Endra Gunawan

STIES Banda Aceh
endra@stiesabang.ac.id

Jahrul Amin

STIES Banda Aceh
jahrulamin99@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of leadership, transparency, use of information technology and internal control systems on the accountability of village fund management in villages in West Simeulue District. The problem that arises is whether leadership, transparency in the use of information technology and internal control systems affect the accountability of village fund management in West Simeulue District? With a sample of 70 respondents and data obtained by distributing questionnaires to respondents. To test each item on each variable has been tested the validity and reliability of the instrument. The results show that simultaneously there is an influence between leadership, transparency, use of information technology, internal control systems and accountability of village fund management by 0.678 or 67.8% and 0.322 or 32.2% influenced by other variables. after the F test, the number $F_{count} > F_{table}$ or $(34,293 > 3.13)$ and a significant test that the p value of $0.000 < p$ is set at 0.05 which means it is significant. Partially shows that: 1. Leadership affects the accountability of village fund management $T_{count} 2.392 > T_{table} 1.667$ and p value $0.020 < p$ from p 0.05 means significant. 2. Transparency affects the accountability of village fund management $T_{count} 2,231 > T_{table} 1,667$ with p value 0.029 from < 0.05 means significant. 3. The use of information technology affects the accountability of village fund management $T_{count} 1.953 > T_{table} 1.667$ with p value 0.030 from < 0.05 means significant. 4. The internal control system affects the accountability of village fund management $T_{count} 4.511 > T_{table} 1.667$ with p value 0.000 from < 0.05 means significant. This means that partially the influence of the internal control system on the accountability of village fund management is more dominant than leadership, transparency and the use of information technology.

Keywords: *Leadership, Transparency, Utilization of Information Technology, Internal Control System, Village Fund Management Accountability*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan, transparansi, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat. Permasalahan yang timbul adalah apakah kepemimpinan, transparansi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Simeulue Barat? Dengan sampel sebanyak 70 responden dan data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ke responden. Untuk menguji setiap item pada setiap variabel telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument. Hasil menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara kepemimpinan, transparansi, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,678 atau 67,8% dan 0,322 atau 32,2% nya dipengaruhi oleh variabel lain. setelah dilakukan uji F diperoleh angka $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $(34.293 > 3,13)$

dan uji signifikan bahwa p value sebesar $0,000 < p$ yang ditetapkan sebesar $0,05$ yang berarti signifikan. Secara parsial menunjukkan bahwa : 1. Kepemimpinana berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa $T_{hitung} 2,392 > T_{tabel} 1,667$ dan p value $0,020 < p 0,05$ berarti signifikan. 2. Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa $T_{hitung} 2,231 > T_{tabel} 1,667$ dengan p value $0,029 < 0,05$ berarti signifikan. 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa $T_{hitung} 1,953 > T_{tabel} 1,667$ dengan p value $0,030 < 0,05$ berarti signifikan. 4. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa $T_{hitung} 4,511 > T_{tabel} 1,667$ dengan p value $0,000 < 0,05$ berarti signifikan. Berarti secara parsial pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa lebih dominan dibanding dengan kepemimpinan, transparansi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kata kunci: *Kepemimpinan, Transparansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*

PENDAHULUAN

Desentralisasi membawa berbagai dampak pada kegiatan administrasi dan pengelolaan pemerintah daerah. Desentralisasi terjadi dalam dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi pemerintahan dan desentralisasi administrasi keuangan. Keduanya dimaksudkan untuk melimpahkan kewenangan kepada daerah agar dapat menggali kemampuan dan potensi daerah masing-masing, sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Secara umum tujuan desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan menerima manfaatnya. Oleh karena itulah beberapa kewenangan dilimpahkan kepada daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan (Nadir, 2013).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, desa yang tersebar diseluruh Indonesia berjumlah 83.344 desa. Di Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota, 289 kecamatan, 6.497 gampong.

Seluruh desa di Indonesia merupakan bagian yang paling kecil, yang dinaungi oleh kabupaten di Indonesia. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa beserta perangkatnya. Kepala desa bertugas untuk melaksanakan pemerintahan desa, meningkatkan pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta memberdayakan masyarakat desa. <http://www.Kemendagri.go.id>.

Pada tahun 2019 Kabupaten Simeulue menerima dana desa sebesar Rp 164.3 miliar yang telah disalurkan ke 138 desa yang tersebar di sepuluh kecamatan dalam wilayah kabupaten Simeulue (<https://beritakini.co>). Jumlah ini meningkat dari alokasi tahun 2018 sebesar Rp 148.5 miliar. Sementara itu, pada tahun 2020 dana desa untuk Provinsi Aceh juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 total dana desa yang diterima Aceh adalah sebesar Rp 4,95 triliun, tahun 2020 naik menjadi sekitar Rp 5,05 triliun, atau terjadi kenaikan sebesar Rp 94,4 miliar dari tahun 2019 (<https://aceh.tribunnews.com/>).

Menurut harian beritakini.com yang di publikasikan pada tanggal 03 Maret 2021 menjelaskan bahwa Kecamatan Simeulue Barat sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Simeulue memiliki jumlah desa sebanyak 14 desa dan Desa Layabaung, Kecamatan Simeulue Barat yang paling tinggi mendapatkan kecurangan dana pada tahun 2019. Dana desa yang disalurkan pemerintah dalam setiap tahunnya sebesar 1 m, diberikan pemerintah untuk pembangunan dan keajahteraan masyarakat desa, tapi sayangnya uang tersebut di gunakan dengan tidak baik masih banyak pembangunan masih terbengkalai, karena ada beberapa desa dimana pembangunan jalannya masih belum terbangun yaitu desa Bikhao, desa Ujung Harapan, desa Sanggiran dan desa Lokmamur dimana jalannya masih belum aspal. Dengan demikian itu seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah desa tapi sayangnya tanggung jawab belum terlaksana dengan baik.

Faktor yang menyebabkan akuntabilitas alokasi dana desa yaitu Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam organisasi atau lembaga pemerintahan sebab merekalah yang akan menjalankan operasional organisasi. Begitu juga kepemimpinan menjadi salah satu indikator kompetensi yang dimiliki kepala desa. Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, yang salah

satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut (Fathoni dkk., 2015). Semakin baik tokoh pemerintah mengetahui kepentingan masyarakat dan memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan masyarakat, maka masyarakat akan semakin baik dalam melaksanakan dan membantu pemerintah dalam pengelolaan program pembangunan tersebut. Kemudian partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting menurut Mahayani (2017), pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat; kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya dan ketiga, mendorong partisipasi umum

LANDASAN TEORI

Desa

Menurut Nadir (2013) Desa adalah susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang berkaitan langsung dengan warga negara.

Akuntabilitas Publik

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Djalil (2014:63) akuntabilitas desa merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan

pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepemimpinan

Menurut Hasibuan (2011:170) kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi

Transparansi

Menurut Mahmudi (2011:60) yaitu keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 yang revisi dari (PP No.56/2005) menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan

mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik

Sistem Pengendalian Intern

Menurut Soleh (2015:102) menjelaskan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Desa di Kecamatan Simeulue Barat sebanyak 14 desa yang berjumlah 70 responden. Masing-masing desa penulis mengambil 5 orang/responden. Dengan demikian jumlah keseluruhan sampel 70 responden yang terdiri dari kepala desa, sekdes, bendahara, BPD dan Kaur. Metode pengumpulan data terdiri dari metode angket (*questionnaire*) wawancara, observasi (*observation*), teknik dokumentasi dan metode penyusutan data daring. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data yang diambil secara langsung di objek penelitian, serta menggunakan kuesioner untuk memperoleh data atau jawaban yang akurat tentang penelitian ini. Serta menggunakan skala likert sebagai

skala pengukuran. Setelah jawaban terpenuhi maka data tersebut ditabulasi untuk menghitung valid dan handal jawaban tersebut. kemudian hasil akan diuji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Setelah ditabulasi data diperoleh hasil bahwa jumlah responden laki 67 orang dibandingkan perempuan yang berjumlah 3 orang, sehingga dapat disimpulkan di kecamatan simeulu barat masih sangat minim menpekerjakan perempuan di kantor kecil. Umur yang paling mendominasi antara 30 sampai 39 tahun, dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang bekerja di kantor kecil di kecamatan Simeulu Barat usia diantara 30 sampai 39 tahun berjumlah 26 orang. Pendidikan terakhir kebanyakan masih SMA berjumlah 41 orang, ini menjelaskan bahwa pekerja yang membantu dikantor kecil rata-rata masih berpendidikan SMA.kalau diperhatikan dari lama bekerja hampir setengah atau sebesar 51% masih bekerja kurang dari 3 tahun, yang artinya pekerja masih kurang berpengalaman.
2. Dilihat dari hasil validitas semua variabel itu valid dengan indikator yang paling dominan dan besar angkanya adalah variabel sistem pengendalian intern. Begitu juga dilihat dari nilai reliabilitas yang paling besar adalah variabel sistem pengendalian intern.

3. Kemudian dilihat dari uji hipotesis dapat dijelaskan pada Tabel 1:

Tabel 1
Analisis Regresi

Model	B	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig
(Constant)	1.385	.489		.626
Kepemimpinan	.264	2.392	1.695	.020
Transparansi	.134	2.231		.029
Pemanfaatan	200	1.953		.030
Teknologi Informasi				
Sistem Pengendalian Intern	707	4,511		.000

Maka dapat ditulis persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,385 + 0,264X_1 + 0,134X_2 + 0,200X_3 + 0,707X_4 + e$$

- a. Konstanta (a) sebesar 1,385 berarti bahwa jika kepemimpinan, transparansi, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dianggap nol (tidak ada), maka akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat adalah 13,85%.
- b. Koefisien regresi kepemimpinan 0,264 berarti bahwa setiap kenaikan 100% kepemimpinan akan menaikkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat sebesar 26,4% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
- c. Koefisien regresi transparansi sebesar 0,134 berarti bahwa setiap kenaikan 100% transparansi akan menaikkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat sebesar 13,4% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
- d. Koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,200 berarti bahwa

setiap kenaikan 100% pemanfaatan teknologi informasi akan menaikkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat sebesar 20,0% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

- e. Koefisien regresi sistem pengendalian intern sebesar 0,707 berarti bahwa setiap kenaikan 100% sistem pengendalian intern akan menaikkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat sebesar 70,7% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan

Uji Simultan

Berdasarkan Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regrission	420.238	4	105.059	34.293	.000 ^b
Residual	199.134	65	3.064		
Total	619.371	69			

Hasil pengujian simultan nilai f_{hitung} sebesar 34,293 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai probabilitasnya (0,000) lebih kecil dari 0,05 atau $(0,000 < 0,05)$ menunjukkan secara simultan variabel kepemimpinan (X_1), transparansi (X_2), pemanfaatan teknologi informasi (X_3), dan sistem pengendalian intern (X_4) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada desa di Kecamatan Simeulue Barat dengan pengujian program SPSS menunjukan bahwa nilai $t_{hitung} = 34,293$

dimana $t_{tabel} = 3,13$, dengan kata lain $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $(34,293 > 3,13)$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari standar yang ditetapkan yaitu 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama atau H_{a1} diterima dan H_{o1} ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari *output* SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat antara lain:

Tabel 3
Test Result of Validity and Reliability

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.824 ^a	.678	.659	1.750

Dari hasil Tabel 3 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi atau R Square (R^2) sebesar 0,678 yang berarti 67,8%. Variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat sebesar 67,8% sedangkan sisanya 32,2% dipengaruhi variabel lainnya. Seperti partisipasi masyarakat, komitmen organisasi dan kompetensi aparat pengelolaan dana desa.

Pembahasan

Pengaruh Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Tabel 1 hasil dari analisis bahwa kepemimpinan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan daan desa (Y) pada desa di Kecamatan Simeulue Barat, bahwa nilai $t_{hitung} = 2,392$ dimana $t_{tabel} = 1,667$, dengan kata lain $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi

sebesar 0,020 yang berarti lebih kecil dari standar yang ditetapkan yaitu 0,05.

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa “kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada desa di Kecamatan Simeulue Barat”. Berarti dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_{a2} diterima dan H_{o2} ditolak. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin baik kepemimpinan Kepala Desa maka semakin meningkat pula terjadinya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kepemimpinan Kepala Desa merupakan suatu hal yang sangat penting adanya di setiap desa, karena pada hakikatnya Kepala Desa mempunyai tanggungjawab dalam terlaksananya pengelolaan dana desa yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara baik.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Tabel 1 bahwa transparansi (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada desa di Kecamatan Simeulue Barat menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 2,231$ dimana $t_{tabel} = 1,667$, dengan kata lain $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikan sebesar 0,029 yang berarti lebih kecil dari standar yang ditetapkan yaitu 0,05.

Uji hipotesis yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa “transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat”. Berarti dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_{a3} diterima dan H_{o3} ditolak. Oleh karena itu, semakin transparan pemerintah desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat dalam memberikan informasi, laporan keuangannya dipublikasikan maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Tabel 1 bahwa pemanfaatan teknologi informasi (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada desa di Kecamatan Simeulue Barat bahwa $t_{hitung} = 1,953$ dimana $t_{tabel} = 1,667$, dengan kata lain $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikan sebesar 0,030 yang berarti lebih kecil dari standar yang ditetapkan yaitu 0,05. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa “pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat”. Berarti dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_{a4} diterima dan H_{o4} ditolak.

Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Saat ini penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan desa terutama di desa-desa di empat wilayah penelitian sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya komputer dengan jumlah yang cukup di setiap desa. Komputer ini digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa. Sehingga aparatur desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat dari pada menggunakan cara manual. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Selain itu, peraturan Bupati Simeulue mengenai setiap desa wajib memiliki perangkat komputer minimal dua buah mengharuskan setiap desa harus paham mengenai tata cara penggunaannya

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Tabel 1 bahwa sistem pengendalian intern (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada desa di Kecamatan Simeulue Barat bahwa $t_{hitung} = 4,511$ dimana $t_{tabel} = 1,667$, dengan kata lain $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikan sebesar

0,000 yang berarti lebih kecil dari standar yang ditetapkan yaitu 0,05.

Sistem pengendalian intern pemerintah memberikan keyakinan memadai terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas. Pemerintah desa telah menjalankan asas-asas dalam pengendalian intern, baik dalam pencapaian tujuan secara efisien dan efektif, pelaporan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian pengelolaan dana desa dilakukan berjenjang dimulai dari pengelola keuangan dana desa hingga kepala desa melalui penciptaan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, komunikasi efektif, otorisasi transaksi dan pemantauan dan pengawasan dari BPD. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Santoso (2016) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana Daerah Kabupaten Lampung.

KESIMPULAN

Kepemimpinan, transparansi, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat.

Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat

Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat.

Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Simeulue Barat

Saran

Kepemimpinan, transparansi, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern yang pada akhirnya akan berimplikasi pada ketercapaian visi dan misi pemerintah desa, maka pada kecamatan simeulue barat disarankan agar lebih meningkatkan kepemimpinan, keterbukaan informasi dan lebih mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa

Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada desa di Kecamatan Simeulue Barat, sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut dan luas untuk kedepannya.

REFERENCE

- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Fathoni, M., & Rengu, S. P. 2015. Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1),139-146.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mahayani, N. L. A. 2017. Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2),129-144.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Nadir, S. 2013. Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *JPP . Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Santoso, E. B. 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur)*.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA